

Peran Inovasi Keuangan dalam Meningkatkan Akses ke Layanan Ekonomi di Masyarakat

Sita Dian Afsari^{1*}, M. Zidny Nafi' Hasbi²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

*sitadian99@gmail.com¹, mzidnynafihhasbi@gmail.com²

Korespondensi penulis: sitadian99@gmail.com

Abstract. *Financial innovation plays a crucial role in increasing people's access to economic services, especially in the ever-evolving digital era. Through various forms of innovation such as digital financial services, fintech, mobile banking, and electronic payment systems, people, including those in remote areas—have made it easier to reach banking, investment, and financing services. These innovations help overcome various conventional barriers, such as limited physical infrastructure, high transaction costs, and the unaffordability of formal financial services. In addition, the presence of financial technology also expands financial inclusion by providing products and services that are more flexible, cheap, and easily accessible through mobile devices. This not only encourages local economic growth, but also empowers micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to develop their businesses. However, challenges remain, such as the need for financial literacy, consumer data protection, and adequate regulatory oversight. Therefore, synergy between the government, financial institutions, technology providers, and the community is important to ensure that financial innovation can be utilized optimally and sustainably in promoting inclusive economic prosperity. Financial innovation is not just a technological advancement, but a strategic solution towards economic justice.*

Keywords: *Financial Innovation, Economic Inclusion, Digital Services*

Abstrak. Inovasi keuangan memainkan peran krusial dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, terutama di era digital yang terus berkembang. Melalui berbagai bentuk inovasi seperti layanan keuangan digital, fintech, mobile banking, serta sistem pembayaran elektronik, masyarakat termasuk yang berada di daerah terpencil—semakin mudah menjangkau layanan perbankan, investasi, dan pembiayaan. Inovasi ini membantu mengatasi berbagai hambatan konvensional, seperti keterbatasan infrastruktur fisik, biaya transaksi tinggi, serta ketidakterjangkauan layanan keuangan formal. Selain itu, kehadiran teknologi finansial juga memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan yang lebih fleksibel, murah, dan mudah diakses melalui perangkat seluler. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti perlunya literasi keuangan, perlindungan data konsumen, dan pengawasan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi yang inklusif. Inovasi keuangan bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan solusi strategis menuju keadilan ekonomi.

Kata kunci: Inovasi Keuangan, Inklusi Ekonomi, Layanan Digital

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, transformasi di sektor keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi keuangan, sebagai respons terhadap tantangan dan dinamika ekonomi modern, telah menjadi elemen vital dalam membuka akses yang lebih luas terhadap layanan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Konsep inklusi keuangan kini tidak lagi hanya menekankan pada perluasan akses ke lembaga perbankan konvensional, tetapi juga mencakup berbagai inovasi teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara efisien, aman, dan terjangkau.

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi seperti fintech, mobile banking, e-wallet, dan peer-to-peer lending telah mendefinisikan cara masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, inovasi ini mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan akibat keterbatasan infrastruktur, biaya operasional tinggi, serta keterbatasan literasi finansial. Layanan keuangan digital memungkinkan individu untuk membuka rekening secara daring, menerima pembayaran, mengakses kredit mikro, hingga melakukan investasi, hanya dengan menggunakan perangkat seluler.

Lebih jauh, peran inovasi keuangan tidak hanya terbatas pada aspek aksesibilitas, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sangat terbantu dengan kehadiran inovasi keuangan yang menyediakan alternatif pembiayaan cepat, mudah, dan fleksibel. Dengan dukungan data digital, sistem skor kredit alternatif, dan proses otomatisasi, pelaku usaha kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar.

2. KAJIAN TEORITIS

Inovasi keuangan telah menjadi salah satu pendorong utama dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya di era digital saat ini. Perubahan teknologi dan kemunculan layanan keuangan berbasis

digital, seperti fintech, telah memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional untuk mendapatkan akses ke berbagai produk dan layanan keuangan. Hal ini sangat relevan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah.

Menurut Ismamudi, Hartati, dan Sakum (2023), lembaga keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Bank dan lembaga keuangan lain tidak hanya menyediakan layanan intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam membentuk struktur perekonomian lokal melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah serta program tanggung jawab sosial perusahaan.

Perkembangan teknologi finansial atau fintech telah mengubah lanskap layanan keuangan secara signifikan. Fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, menabung, dan bahkan mendapatkan pinjaman tanpa harus datang langsung ke kantor bank (Negarawati & Rohana, 2024). Bahkan dalam konteks syariah, fintech juga telah mengambil peran strategis. Mariska (2024) menyatakan bahwa fintech syariah dapat menjadi solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan keuangan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Qur'anisa et al. (2024) menekankan bahwa keberadaan fintech mendobrak batasan-batasan geografis dan sosial yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam inklusi keuangan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari kantor cabang bank kini dapat menikmati layanan keuangan melalui smartphone dan jaringan internet. Hal ini mempercepat akses terhadap permodalan, tabungan, dan sistem pembayaran elektronik.

Dalam studi literatur yang lain, Pellu (2024) menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inovasi keuangan memungkinkan pelaku usaha kecil dan mikro untuk lebih mudah mendapatkan modal kerja dan memperluas jaringan usahanya. Fintech memberikan solusi cepat dan efisien yang tidak mengandalkan prosedur birokratis panjang seperti pada bank konvensional. Norrahman (2023) menyoroti bahwa sektor keuangan syariah juga mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi digital. Fintech syariah tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan nilai-nilai keuangan Islam dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Saputra et al. (2023) menambahkan bahwa peran teknologi informasi (TI) secara umum, termasuk dalam sektor keuangan, adalah mempercepat akses, akurasi data, dan pengambilan keputusan. Dengan integrasi TI, layanan keuangan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat sasaran.

Dari sisi hukum dan regulasi, Wahdaniah et al. (2024) serta Hakim et al. (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan inovasi keuangan harus diimbangi dengan kerangka hukum yang adaptif. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan digital akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap layanan fintech, sekaligus melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan data atau penipuan.

Secara makro, Jaya (2023) menjelaskan bahwa inovasi dalam sektor industri, termasuk keuangan, memainkan peran dalam menciptakan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Hal ini diperkuat oleh Riswanto et al. (2024) yang menyebut bahwa ekonomi digital, termasuk bisnis fintech, telah mengubah paradigma interaksi ekonomi menjadi lebih dinamis dan terdesentralisasi. Aditya, Ansori, dan Mubarok (2024) secara khusus mengkaji peran lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis komunitas. Mereka menilai bahwa inovasi keuangan di tingkat lokal sangat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih dengan dukungan teknologi yang mempermudah transaksi dan pencatatan.

Penelitian internasional juga menunjukkan pola yang serupa. Biswas (2021) dalam studinya mengenai layanan keuangan mobile di India menunjukkan bahwa teknologi keuangan mobile secara signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat. Begitu pula Lee (2024) yang menganalisis integrasi platform digital dengan machine learning dan AI, menilai bahwa hal ini mampu mengatasi tantangan regulasi dan memperluas akses keuangan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembiayaan mikro berbasis teknologi, Óskarsdóttir et al. (2020) menunjukkan bahwa kredit mikro berbasis skor kredit dari data smartphone merupakan terobosan besar dalam menjangkau masyarakat unbanked. Hal ini memberikan peluang baru untuk mendesain produk keuangan yang lebih inklusif.

Dari sisi pemberdayaan UMKM, Prawana (2024) dan Widyatmoko, Rahayuningtyas, dan Mintorini (2024) menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam mendukung keberhasilan penggunaan fintech oleh pelaku usaha kecil. Akses saja tidak cukup tanpa pemahaman yang memadai terhadap risiko dan manfaat produk keuangan digital. Akhirnya, laporan dari World Economic Forum (2024) menegaskan bahwa teknologi digital telah teruji mampu menghubungkan lebih dari satu miliar orang ke ekosistem layanan ekonomi. Transformasi digital ini, jika dikelola dengan inklusif dan etis, dapat menjadi pendorong utama keadilan ekonomi global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis peran inovasi keuangan dalam meningkatkan akses ke layanan ekonomi di masyarakat. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, publikasi lembaga keuangan, serta sumber daring terpercaya yang membahas topik inovasi keuangan dan inklusi ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena sifat kajian yang bersifat teoritis-konseptual dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Proses pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjamin relevansi dan aktualitas informasi. Literatur yang dikaji meliputi teori-teori dasar mengenai inovasi keuangan, konsep inklusi keuangan, serta kajian empiris mengenai dampak layanan keuangan berbasis teknologi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, digunakan juga referensi yang membahas tantangan regulasi, literasi keuangan digital, serta dinamika aksesibilitas teknologi di wilayah urban dan rural.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), yakni mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan berbagai perspektif akademik dan praktis, serta merumuskan kesimpulan yang logis dan argumentatif. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur secara kuantitatif dampak inovasi keuangan, tetapi lebih pada menafsirkan, memahami, dan mengkaji secara kritis bagaimana inovasi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses layanan ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat.

Dengan metode studi pustaka ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara perkembangan teknologi keuangan dan keterjangkauan layanan ekonomi, sekaligus mengidentifikasi peluang dan hambatan yang masih dihadapi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan kebijakan publik, penguatan literasi keuangan digital, serta pengembangan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Keuangan dapat Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Masyarakat

Inovasi keuangan merupakan terobosan baru dalam dunia finansial yang mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan inklusif. Salah satu dampak paling signifikan dari inovasi ini adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang selama ini terabaikan oleh sistem perbankan tradisional, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, miskin, atau memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur fisik dan informasi. Dalam konteks ini, inovasi keuangan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan inklusi keuangan—yakni keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem keuangan formal yang memungkinkan mereka untuk menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola risiko secara lebih efektif.

Layanan keuangan digital seperti mobile banking, dompet elektronik (e-wallet), dan financial technology (fintech) lending merupakan contoh nyata bagaimana teknologi mampu mengatasi hambatan geografis dan administratif yang kerap menjadi penghalang utama akses terhadap layanan keuangan. Melalui perangkat seluler dan koneksi internet, masyarakat kini tidak perlu lagi datang ke kantor cabang bank yang jauh dari tempat tinggal mereka. Cukup dengan aplikasi di ponsel, seseorang dapat membuka rekening, mentransfer uang, membayar tagihan, hingga mengakses pinjaman mikro dalam hitungan menit. Hal ini tentunya menjadi solusi nyata bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang sebelumnya tergantung pada sistem ekonomi informal atau rentenir yang mengenakan bunga tinggi.

Selain akses fisik, inovasi keuangan juga mampu menjawab persoalan administratif yang sering kali membatasi masyarakat dari layanan perbankan konvensional. Misalnya, banyak orang dewasa di pedesaan atau sektor informal tidak memiliki dokumen resmi seperti KTP, NPWP, atau slip gaji yang menjadi syarat dasar pembukaan rekening bank. Melalui sistem identifikasi digital, verifikasi biometrik, dan pemanfaatan data alternatif seperti riwayat penggunaan pulsa atau transaksi ecommerce, lembaga keuangan berbasis teknologi dapat menilai kelayakan kredit dan identitas calon nasabah tanpa harus bergantung pada dokumen formal.

Dampak positif dari perluasan inklusi keuangan ini sangat besar. Dengan akses ke layanan keuangan yang memadai, masyarakat miskin dapat mengelola keuangan mereka secara lebih bijak, menyimpan uang secara aman, mendapatkan akses pinjaman untuk kebutuhan

produktif, serta mengantisipasi risiko keuangan mendadak seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. UMKM juga diuntungkan karena mereka dapat memperoleh pembiayaan modal kerja tanpa harus memberikan jaminan besar seperti yang sering disyaratkan bank konvensional. Secara makro, peningkatan inklusi keuangan ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat.

Namun demikian, peningkatan inklusi keuangan melalui inovasi teknologi juga menghadirkan tantangan. Literasi keuangan digital menjadi salah satu prasyarat penting agar masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Banyak masyarakat belum memahami risiko dari transaksi digital, seperti penipuan online, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, selain menyediakan infrastruktur dan teknologi, perlu pula dilakukan edukasi yang masif dan berkelanjutan mengenai penggunaan layanan keuangan digital.

Lebih lanjut, regulasi dan pengawasan dari pemerintah serta otoritas keuangan juga harus diperkuat agar inovasi keuangan dapat berkembang secara sehat tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, misalnya, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan fintech beroperasi secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, inovasi keuangan bukan hanya sekadar modernisasi sektor keuangan, tetapi juga merupakan alat pemberdayaan ekonomi yang mampu membuka peluang dan mengurangi ketimpangan. Ketika masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan mulai terhubung dan terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi formal, maka akan tercipta fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut, peran inovasi keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek aksesibilitas teknologi, tetapi juga dengan dinamika dan transformasi struktural dalam ekosistem keuangan nasional. Inovasi seperti fintech (financial technology) terbukti mampu menjadi alternatif yang efektif terhadap layanan perbankan tradisional yang selama ini belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah pelosok. Menurut Negarawati dan

Rohana (2024), fintech telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan yang lebih fleksibel, cepat, dan minim persyaratan administratif dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian Qur'anisa et al. (2024) menegaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan memungkinkan partisipasi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan formal, terutama melalui platform pinjaman online (peer-to-peer lending), pembayaran digital, hingga investasi berbasis aplikasi. Dalam hal ini, inovasi keuangan bertindak sebagai jembatan antara kelompok masyarakat rentan dan dunia ekonomi formal yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok dengan sumber daya dan informasi yang cukup. Fintech tidak hanya menghadirkan inklusi keuangan, tetapi juga inklusi ekonomi secara lebih luas dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola keuangan dan mengakses peluang usaha.

Sementara itu, Pellu (2024) menyatakan bahwa peningkatan akses keuangan melalui inovasi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan cenderung memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman informal yang merugikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Ismamudi, Hartati, dan Sakum (2023), yang menyebutkan bahwa bank dan lembaga keuangan, dengan bertransformasi secara digital, dapat menjadi katalisator utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional, asalkan transformasi tersebut juga disertai strategi literasi dan perlindungan konsumen yang memadai.

Lebih dari itu, perkembangan financial technology juga memberikan dampak pada sektor keuangan syariah. Norrahman (2023) menjelaskan bahwa fintech syariah telah membuka jalan bagi masyarakat Muslim untuk mengakses layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah secara lebih mudah, tanpa harus terbatas oleh kendala geografis atau kekakuan sistem konvensional. Hal ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi komunitas religius dalam sistem keuangan nasional. Tidak hanya itu, penerapan teknologi informasi yang semakin masif di berbagai sektor, sebagaimana dijelaskan oleh Saputra et al. (2023), telah menciptakan efisiensi, transparansi, dan konektivitas tinggi dalam ekosistem keuangan digital, yang secara otomatis memperkuat fondasi inklusi keuangan.

Namun, perlu disadari bahwa peningkatan akses keuangan digital juga harus diimbangi dengan kejelasan regulasi. Wahdaniah et al. (2024) menekankan pentingnya penguatan hukum lembaga keuangan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan pengguna jasa

keuangan digital. Buku ajar dari Hakim et al. (2022) juga menyoroti perlunya pengawasan yang adaptif dan progresif dari regulator untuk menghadapi tantangan era digital, termasuk isu perlindungan data pribadi, transparansi transaksi, dan mitigasi risiko penipuan dalam ekosistem fintech.

Dengan semua perkembangan tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Jaya (2023) dalam pembahasan ekonomi industri, inovasi keuangan harus dilihat sebagai bagian dari strategi industrialisasi digital yang inklusif. Jika disinergikan dengan program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan UMKM, maka inovasi keuangan dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan keadilan ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh Riswanto et al. (2024) yang melihat dinamika ekonomi digital sebagai peluang emas bagi terciptanya transformasi sosial-ekonomi yang lebih merata.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan fintech, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Inovasi tidak hanya berarti menciptakan teknologi baru, tetapi juga membangun ekosistem yang mampu melayani semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi digital.

Tantangan Implementasi Inovasi Sektor Keuangan untuk Perluasan Akses Layanan Ekonomi

Tantangan dalam mengimplementasikan inovasi di sektor keuangan untuk memperluas akses layanan ekonomi kepada masyarakat bersifat kompleks dan multidimensi. Meskipun inovasi keuangan seperti financial technology (fintech), mobile banking, dan digitalisasi layanan perbankan telah membawa banyak kemajuan, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital (digital divide), terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat digital (smartphone atau komputer), serta literasi digital dasar. Akibatnya, kelompok masyarakat ini tetap tertinggal dari akses layanan keuangan digital meskipun inovasi telah tersedia. Dalam hal ini, inovasi tidak serta-merta inklusif apabila tidak disertai pembangunan infrastruktur yang merata.

Selanjutnya, tingkat literasi keuangan yang rendah juga menjadi kendala serius. Banyak masyarakat belum memahami secara mendalam produk-produk keuangan, risiko investasi, penggunaan aplikasi digital, atau bahkan perbedaan antara layanan resmi dan praktik pinjaman ilegal (fintech lending ilegal). Hal ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan atau penipuan yang justru merugikan pengguna. Tanpa edukasi dan perlindungan konsumen yang cukup, inovasi keuangan justru dapat menciptakan masalah baru seperti utang konsumtif, ketergantungan terhadap pinjaman online, dan kerentanan terhadap data pribadi.

Keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan besar dalam konteks digitalisasi keuangan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam transaksi keuangan, risiko peretasan, pencurian data, hingga penipuan daring juga meningkat. Masyarakat pengguna layanan keuangan digital sering kali menjadi sasaran empuk karena lemahnya sistem pengamanan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Sektor keuangan, baik yang konvensional maupun fintech, dituntut untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber mereka secara berkala.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dan harmonis juga menjadi hambatan. Sering kali, inovasi keuangan bergerak lebih cepat dibanding kemampuan lembaga pengawas atau regulator dalam menyusun kebijakan dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, muncul kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, atau bahkan pelaku usaha yang beroperasi tanpa kejelasan hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Menurut Wahdaniah et al. (2024), regulasi yang baik harus mampu menjamin keamanan, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap bentuk inovasi keuangan.

Kemudian, resistensi dari institusi keuangan tradisional juga kerap muncul sebagai tantangan. Beberapa bank atau lembaga keuangan konvensional masih enggan mengadopsi teknologi baru karena faktor biaya, perubahan sistem kerja, atau kekhawatiran akan kehilangan basis pelanggan tradisional mereka. Padahal, kolaborasi antara lembaga keuangan konvensional dengan pelaku fintech dapat menjadi strategi sinergis untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan dominasi ekonomi informal juga turut memengaruhi efektivitas implementasi inovasi keuangan. Masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap, tidak memiliki dokumen identitas atau rekening bank, serta bekerja di sektor informal kerap kali terabaikan oleh sistem keuangan

formal. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang berpihak pada kelompok marjinal agar mereka tidak terus-menerus tersingkir dari transformasi ekonomi digital.

Dari sudut pandang operasional, sektor keuangan juga menghadapi kendala dalam hal biaya pengembangan teknologi dan adaptasi sumber daya manusia. Inovasi keuangan memerlukan investasi besar dalam pengembangan sistem, pelatihan karyawan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Tidak semua lembaga keuangan, terutama koperasi atau bank daerah, memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk melakukan transformasi digital secara optimal.

Terakhir, muncul pula persoalan etika dan tanggung jawab sosial. Inovasi keuangan, jika tidak dikendalikan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial semata, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor keuangan perlu memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan (sustainability), etika, dan tanggung jawab sosial.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Inovasi keuangan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal transformasi budaya, struktur, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Maka, inovasi harus disertai visi pembangunan inklusif, literasi menyeluruh, perlindungan konsumen yang kuat, serta sistem pengawasan yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman..

Literasi digital dan literasi keuangan adalah fondasi utama agar masyarakat mampu memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan inovatif secara bijak. Menurut Qur'anisa et al. (2024), peningkatan literasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal serta mencegah penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui edukasi publik, tetapi juga harus menjadi perhatian dari sektor swasta, termasuk fintech dan bank digital, yang harus aktif menjalankan program edukasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Lebih lanjut, penguatan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap inovasi juga menjadi keharusan. Regulasi yang responsif tidak boleh menghambat perkembangan teknologi, namun tetap menjamin perlindungan terhadap konsumen, mencegah praktik keuangan ilegal, dan mendorong kompetisi sehat dalam industri keuangan. Hakim et al. (2022) dalam "Financial Technology Law" menekankan pentingnya kebijakan hukum yang fleksibel

namun tegas dalam menghadapi dinamika digitalisasi keuangan, termasuk melalui perizinan, pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ramah terhadap masyarakat kecil.

Kemudian, penting pula memperkuat kolaborasi antara bank tradisional dan perusahaan fintech. Bukan sebagai pesaing, keduanya harus dilihat sebagai mitra yang saling melengkapi. Bank memiliki jaringan, stabilitas, dan legitimasi, sementara fintech memiliki fleksibilitas, kecepatan, dan daya jangkau yang luas melalui teknologi. Ismamudi et al. (2023) menyebut bahwa kemitraan antara bank dan fintech akan memperluas akses kredit mikro, pembiayaan usaha kecil, serta layanan tabungan digital di daerah-daerah yang belum terjangkau bank konvensional.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah harus mendorong pembangunan infrastruktur digital secara merata, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Akses internet menjadi prasyarat dasar untuk memanfaatkan layanan keuangan digital. Riswanto et al. (2024) dalam kajiannya mengenai dinamika ekonomi digital menyoroti bahwa infrastruktur jaringan dan kebijakan telekomunikasi harus berjalan beriringan dengan agenda inklusi keuangan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan digital yang justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Di sisi lain, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber menjadi tantangan krusial yang memerlukan respons teknologi dan regulasi secara simultan. Fintech dan lembaga keuangan harus membangun sistem enkripsi yang kuat, menerapkan standar keamanan global, serta terbuka terhadap audit dan pengawasan publik. Wahdaniah et al. (2024) mengingatkan bahwa tanpa keamanan yang terpercaya, masyarakat akan ragu memindahkan aktivitas keuangan mereka ke platform digital.

Dalam konteks syariah, inovasi keuangan juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam. Norrahman (2023) menyebut bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat Muslim yang sebelumnya enggan menggunakan jasa keuangan konvensional karena alasan prinsip. Oleh karena itu, pengembangan layanan keuangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, budaya, dan keyakinan masyarakat agar lebih diterima dan dipercaya.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa transformasi sektor keuangan tidak dapat bergantung hanya pada teknologi. Dibutuhkan transformasi mentalitas, reformasi kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses perubahan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dari inovasi keuangan, maka inklusi keuangan dapat menjadi alat pemberdayaan yang sejati.

Dalam jangka panjang, keberhasilan inovasi keuangan dalam memperluas akses ekonomi akan terlihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pellu (2024), inklusi keuangan yang didorong oleh inovasi akan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, segala tantangan yang muncul bukan untuk dihindari, tetapi harus dijadikan pijakan untuk membangun sistem keuangan masa depan yang lebih adaptif, inklusif, dan manusiawi.

Peran Teknologi Finansial dalam Meningkatkan Akses Layanan Keuangan Masyarakat

Penggunaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah membawa transformasi mendasar dalam lanskap layanan keuangan global, termasuk di Indonesia. Fintech berperan besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (unbanked) maupun yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional (underbanked). Melalui berbagai inovasi berbasis teknologi, fintech menawarkan solusi keuangan yang lebih efisien, cepat, fleksibel, dan terjangkau, sehingga mampu menjawab berbagai keterbatasan sistem keuangan tradisional.

Salah satu peran utama fintech adalah dalam menyederhanakan proses akses layanan keuangan. Jika sebelumnya seseorang perlu datang ke kantor bank, menyerahkan dokumen fisik, dan menjalani proses verifikasi panjang untuk membuka rekening atau mengajukan pinjaman, kini semua itu dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi fintech. Teknologi seperti e-KYC (electronic Know Your Customer), tanda tangan digital, dan integrasi dengan data Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) memungkinkan verifikasi identitas secara daring yang cepat dan aman. Proses ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya terkendala oleh jarak geografis dan infrastruktur fisik.

Selain itu, fintech juga menyediakan layanan keuangan mikro yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal. Melalui platform peer-to-peer (P2P) lending, misalnya, fintech mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung tanpa melalui perantara bank. Menurut Qur'anisa et al. (2024), model ini telah terbukti mampu menjangkau kelompok yang tidak memiliki agunan atau riwayat kredit formal, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. Proses penilaian risiko kredit oleh fintech juga lebih adaptif karena menggunakan teknologi big data dan

machine learning untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan aktivitas digital pengguna, bukan hanya histori kredit formal.

Efisiensi biaya juga menjadi daya tarik utama dari fintech. Tanpa kebutuhan untuk membangun kantor cabang fisik atau membayar pegawai dalam jumlah besar, fintech dapat menawarkan biaya layanan yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian produk keuangan dengan biaya minimal, bahkan gratis dalam banyak kasus. Menurut Negarawati dan Rohana (2024), efisiensi ini telah membuat layanan keuangan lebih inklusif dan menarik minat generasi muda serta masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya enggan atau tidak mampu mengakses bank konvensional.

Tidak hanya dalam aspek pinjaman dan pembayaran, fintech juga mendorong inovasi dalam tabungan, investasi, dan asuransi digital. Aplikasi micro-saving dan micro-investment memungkinkan masyarakat menabung atau berinvestasi dengan nominal kecil, misalnya mulai dari Rp10.000. Dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan fitur edukasi yang interaktif, fintech memudahkan masyarakat awam memahami konsep keuangan dan mulai membangun kebiasaan menabung atau berinvestasi. Ini adalah kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Fintech juga turut mendorong transparansi dan pemberdayaan ekonomi. Transaksi digital yang tercatat secara otomatis membentuk rekam jejak finansial (digital footprint), yang kelak dapat digunakan untuk mengakses produk keuangan lain seperti asuransi atau pembiayaan usaha. Dengan kata lain, fintech menjadi pintu masuk bagi masyarakat informal menuju sistem keuangan formal. Ismamudi et al. (2023) menekankan bahwa dengan memperluas basis data keuangan masyarakat, fintech juga membuka peluang bagi perumusan kebijakan ekonomi berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Namun, keberhasilan fintech dalam meningkatkan akses keuangan juga sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung. Ketersediaan jaringan internet yang merata, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta literasi digital menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat. Hakim et al. (2022) menegaskan pentingnya regulasi yang mampu mengimbangi laju inovasi fintech, tanpa menghambat kreativitas dan pertumbuhan industri.

Dalam konteks pembangunan inklusi keuangan nasional, peran fintech sangat strategis. Sebagaimana dikemukakan oleh Pellu (2024), fintech bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga

instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya keuangan. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT), peran fintech diprediksi akan semakin vital dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih terbuka, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Secara keseluruhan, fintech telah membuka peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Dengan tetap memperhatikan etika, keamanan, dan edukasi publik, teknologi finansial dapat menjadi kekuatan transformatif yang memberdayakan masyarakat dari segala lapisan untuk mengakses layanan keuangan yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ke depan, potensi pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam memperluas akses keuangan diperkirakan akan semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta adopsi teknologi digital oleh masyarakat luas. Bahkan, dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, fintech telah terbukti menjadi alat penting untuk mempertahankan kelangsungan transaksi ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat informal yang sangat terdampak krisis. Menurut Riswanto et al. (2024), akselerasi digitalisasi ekonomi yang dipicu oleh pandemi telah menciptakan percepatan adopsi layanan fintech secara signifikan, baik dalam bidang pembayaran digital, pembiayaan daring, maupun investasi mikro. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi finansial mampu merespons kebutuhan ekonomi secara adaptif, fleksibel, dan cepat.

Lebih jauh, perkembangan fintech juga memberikan dampak positif terhadap literasi keuangan masyarakat. Banyak platform fintech yang menyertakan fitur edukasi finansial seperti simulasi pinjaman, manajemen keuangan pribadi, hingga rekomendasi investasi berbasis profil risiko. Edukasi yang dikemas secara digital dan interaktif ini mampu menjangkau generasi muda serta kalangan masyarakat yang sebelumnya kurang familiar dengan produk keuangan formal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan, daya jangkauan dan efektivitas fintech pun semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahdaniah et al. (2024) yang menyatakan bahwa edukasi finansial digital merupakan fondasi utama dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di era digital.

Selain itu, kemajuan teknologi finansial juga mendorong munculnya model bisnis keuangan baru yang lebih inklusif, seperti crowdfunding, insurtech, dan robo-advisor. Crowdfunding memungkinkan masyarakat mengakses pembiayaan usaha tanpa harus melalui

lembaga keuangan tradisional, sementara insurtech (insurance technology) menyediakan layanan asuransi mikro yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, robo-advisor yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi otomatis membuka akses terhadap layanan pengelolaan aset yang sebelumnya hanya tersedia bagi kalangan menengah ke atas. Model-model ini memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih luas, murah, dan terjangkau, serta mendorong pemerataan akses ekonomi.

Namun demikian, peran fintech tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah perlindungan konsumen, terutama dalam hal transparansi biaya, tingkat bunga pinjaman, dan keamanan data pribadi. Tidak sedikit kasus di mana pengguna aplikasi pinjaman online (pinjol) menjadi korban penyalahgunaan data atau terjebak dalam bunga yang mencekik akibat kurangnya literasi digital dan keuangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sangat penting untuk memastikan bahwa fintech beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Hakim et al. (2022) dalam Buku Ajar Financial Technology Law menekankan pentingnya aspek hukum dan etika dalam pengembangan layanan fintech, agar inovasi keuangan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.

Kerja sama antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk membangun ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok desa, pelaku fintech harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, dan masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan. Sinergi inilah yang akan memperkuat peran fintech sebagai pendorong utama inklusi keuangan nasional. Dalam hal ini, Jaya (2023) menyatakan bahwa inklusi keuangan berbasis digital bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga kebijakan sosial untuk mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki peran strategis dalam mempercepat akses ke layanan keuangan yang efisien dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi, fintech mampu menjangkau kelompok rentan, mengatasi hambatan geografis, serta memberdayakan individu untuk mengelola keuangan secara mandiri. Ke depan, tantangan dan peluang dalam pengembangan fintech akan terus berkembang seiring dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan fintech selalu sejalan dengan prinsip inklusi, perlindungan konsumen, keberlanjutan, dan keadilan sosial agar manfaatnya benar-benar

dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Inovasi keuangan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech), telah menjadi pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan yang lebih luas, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Berbagai bentuk inovasi seperti dompet digital, layanan pembayaran daring, platform peer-to-peer lending, crowdfunding, hingga insurtech telah membuka jalan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari akses layanan perbankan konvensional khususnya masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, dan sektor informal. Inovasi ini telah menghadirkan solusi praktis terhadap keterbatasan akses geografis, biaya layanan yang tinggi, dan rendahnya literasi keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian, fintech bukan hanya berperan dalam menyediakan layanan keuangan digital, tetapi juga turut mengedukasi masyarakat melalui fitur-fitur edukatif yang dibangun ke dalam platform digital. Hal ini menciptakan efek ganda: meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas jangkauan layanan. Namun, keberhasilan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit, seperti perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, regulasi yang adaptif, serta kebutuhan akan infrastruktur digital yang merata. Tanpa mitigasi terhadap tantangan-tantangan ini, inovasi keuangan bisa berubah menjadi ancaman baru, alih-alih menjadi solusi inklusi.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan inovasi keuangan dalam mendorong inklusi ekonomi tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, regulator keuangan, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran inovasi keuangan dalam masyarakat bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan struktural, terkait erat dengan upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarak, A. F. (2024). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tahunan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3444–3455.
- Biswas, S. (2021). Effect of mobile financial services on financial behavior in developing economies: Evidence from India. *arXiv preprint arXiv:2109.07077*.
- Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. (n.d.). *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 279–295.
- Hakim, L., Hapsari, R. A. (2022). *Buku ajar financial technology law*. Penerbit Adab.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran bank dan lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi: Tinjauan literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35–44.
- Jaya, W. K. (2023). *Ekonomi industri*. UGM PRESS.
- Lee, L. (2024). Enhancing financial inclusion and regulatory challenges: A critical analysis of digital banks and alternative lenders through digital platforms, machine learning, and large language models integration. *arXiv preprint arXiv:2404.11898*.
- Mariska, V. (2024). Fintech sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 231–238.
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 46–60.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nuriya, N. S., & Muchtar, A. R. F. (2024). Transformasi ekonomi Islam melalui solusi fintech digital: Jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 89–100.
- Óskarsdóttir, M., Bravo, C., Sarraute, C., Baesens, B., & Vanthienen, J. (2020). Credit scoring for good: Enhancing financial inclusion with smartphone-based microlending. *arXiv preprint arXiv:2001.10994*.
- Pellu, A. (2024). *Peningkatan akses keuangan: Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif*.
- Prawana, I. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 45–58.
- Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., Putri, M. H., & Feriyanto, O. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital: Studi literatur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 99–114.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi bisnis digital: Dinamika ekonomi bisnis di era digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *Teknologi informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahdaniah, B., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum lembaga keuangan*. CV. Gita Lentera.

Widyatmoko, W., Rahayuningtyas, T. E., & Mintorini, E. (2024). Peran layanan digital bagi UMKM dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 4(2), 112–125.

World Economic Forum. (2024). *How we connected one billion lives through digital technology. Time.*